



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Diponegoro No. 7 Telp. 0373 21033 fax. 0373 21875 Dompu-NTB

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT., dengan limpahan kekuatan dan kesehatanNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini disampaikan terima kasih.

Dompu, Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dompu,



AMIRUDDIN, S.HUT
NIP. 19711130 199803 1 009

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Kondisi Aparatur.....	6
1.5 Isu dan Permasalahan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	19
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.....</i>	<i>13</i>
Tabel 2.	<i>Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.....</i>	<i>16</i>
Tabel 3.	<i>Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023</i>	<i>17</i>
Tabel 4.	<i>Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023.....</i>	<i>18</i>
Tabel 5.	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja.....</i>	<i>19</i>
Tabel 6.	<i>Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dompu....</i>	<i>21</i>
Tabel 7.	<i>Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Pencapaian Akuntabilitas Tahun 2023</i>	<i>23</i>
Tabel 8.	<i>Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023.....</i>	<i>25</i>
Tabel 9.	<i>Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2023</i>	<i>26</i>
Tabel 10.	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2023.....</i>	<i>28</i>
Tabel 11.	<i>Luas Lahan Rehabilitas Mangrove (Ha) Tahun 2019-2023.....</i>	<i>28</i>
Tabel 12.	<i>Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Presentase Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023</i>	<i>30</i>
Tabel 13.	<i>Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2021-2024 dan Target Akhir RPJD Tahun 2026.....</i>	<i>31</i>
Tabel 14.	<i>Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023</i>	<i>31</i>
Tabel 15.	<i>Rincian Produksi Budidaya (Ton) Tahun 2021-2023</i>	<i>33</i>
Tabel 16.	<i>Jumlah Pencapaian Sarana dan Prasarana Tahun 2021-2023.....</i>	<i>35</i>
Tabel 17.	<i>Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023</i>	<i>36</i>
Tabel 18.	<i>Jumlah RTP Pemasar dan Pengolah (orang) Tahun 2019-2023</i>	<i>38</i>
Tabel 19.	<i>Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat.....</i>	<i>40</i>
Tabel 20.	<i>Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023</i>	<i>42</i>
Tabel 21.	<i>Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023</i>	<i>48</i>
Tabel 22.	<i>Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....</i>	<i>49</i>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Dinas yang sudah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati Dompu Tahun 2023. Dalam hal ini, LAKIP merupakan alat ukur untuk OPD/SKPD dalam mengemban visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah terbit Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Dompu.

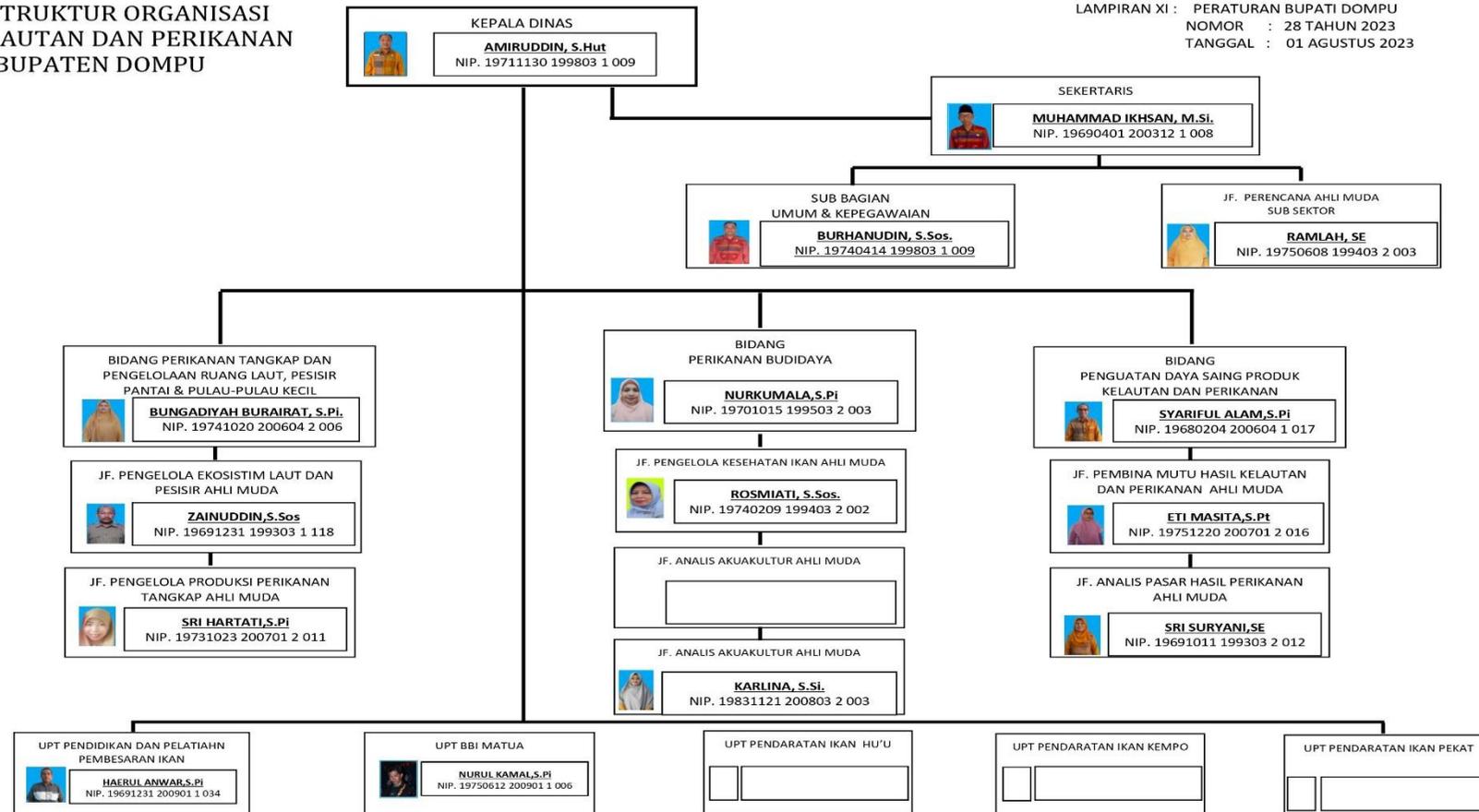
Dinas Kelautan dan Perikanan mengemban tugas mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat persatuan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah pada pasal 12 sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Peisisir Pantai dan Pulau-Pulau Keci;
 - d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Jabatan Pelaksana
 - h. UPTD

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DOMPU**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2023



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, merupakan salah satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu. Tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu diatur dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

1.3.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2023 Tanggal 1 Agustus 2023, dimuat dalam Lampiran VIII.b sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| Kepala Dinas | : Mempunyai mempunyai tugas pokok yakni memimpin, melaksanakan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. |
| Sekretariat Dinas | : Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, pengawasan, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. |

Kepala Sub Bagian Umum : Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan sub bagian Dan Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan ketatausahaan, dan kepegawaian

Kepala bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang pulau, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil (PTRLP4K) : Mempunyai tugas melaksanakan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, inventarisasi dan penerapan peraturan-peraturan dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Kepala bidang perikanan Budi Daya (PBD) : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya.

Kepala bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan (PDSPKP) : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang-bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

Kepala Dinas : • Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan

- Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat Dinas

- :
- Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
 - Perencanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan
 - Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.
 - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan
 - Membagi tugas kepada sub bagian yang menjadi tanggung jawabnya
 - Memberikan arahan kepada kepala bidang dan kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan baik
 - Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan kepala UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - Menilai prestasi kepala bidang dan kepala UPT

- Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dibidang kelautan dan perikanan
- Menyusun laporan dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- Melaksanakan administrasi dalam bentuk evaluasi dan monitoring dibidang sekretariat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** :
- Melakukan urusan ketatausahaan/surat menyurat
 - Melakukan urusan kepegawaian di lingkungan dinas
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
 - Memproses usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai negeri sipil
 - Memproses usul diklat bagi pegawai negeri sipil
 - Memproses usul pengangkatan CPNS dan PNS
 - Memproses cuti dan izin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap
 - Menyusun DUK PNS

- Memproses penempatan pegawai dalam lingkungan dinas kebijakan kepala dinas
- Membantu kepala dinas dalam pembinaan pegawai
- Memfasilitasi penyelesaian DP3 PNS/CPNS
- Melakukan pembinaan pegawai
- Melakukan urusan perlengkapan dan asset milik dinas
- Fasilitas pelayanan administrasi pengajuan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas keluar daerah yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu
- Melaksanakan urusan kerumah tangaan dan keprotokolan
- Menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sub bagian umum dan kepegawaian sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan (LAKIP) Sekretaris
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

**Kepala Bidang
Perikanan Tangkap
dan Pengelolaan
Ruang Laut,
Pesisir Pantai dan
Pulau-Pulau Kecil
(PTRLP4K)**

- Perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, prosedur kerja, implementasi dan identifikasi tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan sumberdaya
- Pelaksanaan bimbingan teknis, monev, pelaporan, rehabilitasi di bidang

perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil

- Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil
- Melaksanakan administrasi dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

**Kepala Bidang :
Perikanan Budidaya
(PBD)**

- Perumusan kebijakan pemetaan tata ruang komoditas, penataan alih fungsi lahan dan inventarisasi lahan perluasan areal dan pengelolaan tata huna lahan kelautan dan perikanan
- Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan tata guna lahan, sarana prasarana kelautan dan perikanan
- Menyusun rencana dan program kerja dibidang perikanan budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Bimbingan dan pengendalian terhadap mutu produksi dan pemanfaatan benih

ikan dan kesehatan lingkungan serta penanganan hama dan penyakit

- Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi pengembangan lahan dan pengendalian terhadap mutu usaha budidaya dan produksi perikanan
- Melaksanakan administrasi bidang pengelolaan dan kajian-kajian usaha budidaya perikanan

**Kepala Bidang :
Penguatan Daya
Saing Produk
Kelautan Dan
Perikanan (PDSPKP)**

- Perumusan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan perikanan dan inventarisasi
- Melaksanakan kebijakan dibidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penanganan mutu, diverifikasi produk, sistim logistik produk kelautan dan perikanan dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan
- Penyusunan pedoman, prosedur, kriteria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, terhadap penguatan daya produk kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu diverifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistim logistik serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan

- Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penguatan daya saing produk kelautan perikanan
- Menyiapkan data statistik daya saing produk
- Melaksanakan administrasi dibidang penguatan daya saing produk kelautan perikanan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Kondisi Aparatur

Sumber daya aparatur/sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya merupakan faktor yang penting bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, pada saat ini Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2022 meliputi :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak | 40 orang. |
| 2. Tenaga Kontrak Daerah sebanyak | 8 orang. |
| 3. Tenaga Kontrak Dinas sebanyak | 18 orang. |
| 4. Tenaga Sukarela Dinas sebanyak | 9 orang. |
| 5. Tenaga Kontrak Pusat (PPB) Sebanyak | 6 orang. |

Dilihat dari tingkat pendidikan jumlah PNS terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. S2 sebanyak | 1 orang |
| 2. S1 sebanyak | 27 orang |
| 3. Sarjana Muda | - orang |
| 4. SLTA sederajat | 10 orang |
| 5. SLTP sederajat | 2 orang |
| 6. SD sederajat | - orang |

Yang mengikuti DIKLAT Fungsional :

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. SPAMA / DIKLAT PIM III | 2 orang |
| 2. DIKLAT PIM IV | 2 orang |

Jumlah PNS berdasarkan golongan :

Golongan IV	5 orang
Golongan III	24 orang
Golongan II	11 orang
Golongan I	- orang

Jumlah PNS berdasarkan golongan :

Jabatan Struktur	8 orang
Jabatan Fungsional	8 orang
Staf	24 orang

Dari segi kuantitas, jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut dirasakan belum cukup untuk menunjang beban kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, jumlah jabatan pelaksana masih kurang memadai, baik di sekretariat dan bidang-bidang teknis maupun UPT Dinas. Hasil Anjab ABK Dinas Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan masih kekurangan jabatan pelaksana sebanyak 79 orang, sementara dari segi kualitas Pegawai Negeri Sipil bersama tenaga kontrak dirasakan belum cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dinas.

1.4 Isu dan Permasalahan

1.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kelautan dan perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas internal yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu antara lain :

a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Kelautan dan Perikanan

Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM kelautan dan perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Jumlah jabatan pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan yang sangat terbatas, disamping itu masih kurangnya pelatihan/Diklat Teknis yang diadakan/diikuti.

b. Belum sempurnanya basis data dan informasi kelautan dan perikanan

Data serta informasi tentang kelautan dan perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, ketersediaan data yang akurat dan terkini menjadi salah satu faktor penting. Statistik Kelautan dan Perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data kelautan dan perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Petugas statistik masih merangkap sebagai pejabat pelaksana bidang dan sebagian besarnya masih tenaga honorer, kurangnya anggaran yang mendukung operasional validasi data juga merupakan kendala belum terwujudnya data yang lengkap dan akurat. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan serta data sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan bagi pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu adalah :

1. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik

Tata ruang peruntukan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan kelautan dan perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

2. Terbatasnya permodalan

Diharapkan adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk meminimalisir persyaratan agunan dalam mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas.

Bank BRI membuka akses permodalan melalui Kredit KUR untuk pembudidaya komoditi udang Vaname, Bank BRI masih membatasi calon debiturnya pada pembudidaya tambak udang vaname. Tahun 2023 yang diusulkan sebanyak 6 (enam) proposal usulan dengan total nilai usulan Rp. 450.000.000,-, dan terealisasi 1 (satu) proposal senilai Rp. 70.000.000,-.

3. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada menurunnya produksi dan tingkat pendapatan pelaku usaha perikanan.

4. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan belum dapat sepenuhnya dikelola seperti budidaya rumput laut baru dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut 450 ha atau (11,33%) sementara lahan potensi pengembangan budidaya perairan payau (tambak) 4.700 ha dengan tingkat pemanfaatan mencapai 2.270 Ha atau (48,30%), sedangkan potensi lahan budidaya perairan umum (air tawar) diperkirakan 602 Ha yang meliputi lahan kolam \pm 371 Ha dan baru dimanfaatkan \pm 75 Ha atau (20,21%).

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat sepenuhnya dikelola seperti potensi budidaya air laut, Potensi budidaya air laut diperkirakan mencapai 3.972 ha, baru dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut 450 ha, budidaya kerang mutiara dan budidaya lobster, dengan luas yang kurang signifikan, sementara luas potensi pengembangan budidaya perairan payau (tambak) 4.700 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.270 ha, sedangkan potensi lahan budidaya perairan umum (air tawar) diperkirakan 275 ha belum dimanfaatkan, potensi lahan budidaya air tawar diperkirakan mencapai 371,1 ha, dan baru dimanfaatkan 75 ha.

5. **Penggunaan Alat Tangkap yang tidak Ramah Lingkungan**

Pada tahun 2023 di Dompu masih terdapat penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan, yaitu menggunakan Potas, Pemboman, dan

penggunaan Jaring Waring dan alat bantu penangkaoan (kompresor).

Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih dilakukan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Dompu yaitu penangkapan dengan bom, bahan kimia, dan alat yang tidak ramah lingkungan (penangkapan dengan bahan peledak/bom) masih terjadi di perairan Soro Kecamatan Kempo, Desa Doro Peti, Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat (Teluk Sanggar) dan untuk menindak kegiatan penangkapan dengan bom, telah ditindak lanjut sampai putusan pengadilan selama \pm 14 bulan kurungan penjara an. Mahdin Desa Lasi, penindakan pelaku bom yang ada di Desa Kiwu diganti alat tangkap dan sarprasnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa perahu dan alat penangkapan ikan.

Pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa bahan kimia terjadi hampir semua lokasi teluk, pelakunya adalah masyarakat perkotaan atau masyarakat pedesaan yang jauh dari perairan pantai, jenis barangnya adalah racun bawang dan racun lainnya.

Pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu jarring waring yang terdapat di Teluk Cempi sebanyak 56 orang nelayan, yang berasal dari Desa Nowa, Baka Jaya, Bara, Wawonduru dan Mbawi, sebagian nelayan pemakai jarring waring tersebut telah diganti alat tangkapnya, akan tetapi tetap melakukan penangkapan ikan dengn alat tersebut sampai hari, dikarenakan DPRD Kabupaten Dompu masih memberikan peluang penggunaan jaring waring untuk sementara.

Penggunaan alat bantu penangkapan ikan yaitu berupa kompresor di semua teluk yaitu Sanggar, Teluk Cempi dan Teluk Saleh, yang mengakibatkan keberlanjutan populasi ikan semakin cepat punah, pelakunya masyarakat nelayan Kabupaten Dompu dan masyarakat luar Kabupaten Dompu.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu terus berupaya mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan serta tetap berkoordinasi dengan pihak terkait (Polairut Polres Dompu, UPT PSDKP DKP Provinsi Wilayah Bima Dompu, BKIPM Kelas III Wilayah Bima, Pos Angkatan Laut Calabai, Kepala Wilayah setempat dan Pokmaswas, mengadakan patroli keamanan laut. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pengelolaan Ruang Laut Pulau-Pulau Kecil serta aturan lainnya. Pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti jaring waring secara berangsur-angsur dilakukan upaya persuasif dengan mengganti alat tangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

6. Serangan Penyakit pada Usaha Budidaya

Serangan penyakit pada usaha budidaya perikanan kerap kali terjadi di wilayah kecamatan Woja dan Manggelewa. Selama kurun waktu Tahun 2023 di Kabupaten Dompu, serangan penyakit yang sering dijumpai pada budidaya udang yaitu *White Spot Syndrome* (WSS) dan budidaya bandeng adalah *Vibriosis*.

Upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi hal tersebut yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan pendampingan penerapan pola CPIB (cara pembenihan yang ikan baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), dan bekerja sama dengan BKIPM Bima untuk rutin mengambil sampling air dengan udang guna dilakukan uji laboratorium.

7. Sarana Rantai Dingin Yang Belum Memadai

Sarana yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah sarana rantai dingin, dari Dana DAK tahun 2023 ada rehabilitasi Pabrik Es di Desa Jala Kecamatan Hu'u dan

Rehabilitasi Coolstorage di Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, untuk menanggulangi kebutuhan es pada nelayan dan pembudidaya.

8. Sarana Budidaya yang Belum Memadai

1. Masih kurangnya *Excavator* yang sangat diharapkan untuk rehabilitasi tambak yang sudah terkena dampak ROB, dan pembuatan jalan produksi terhadap tambak-tambak yang berada di wilayah dalam untuk menghemat biaya produksi
2. Ketersediaan saluran primer, sekunder dan tersier yang kurang memadai guna memperlancar aliran masuk dan keluarnya air ke tambak.
3. Ketersediaan benih udang, bandeng dan benih ikan air tawar yang belum mencukupi
4. Adanya UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Diklat dan pembesaran ikan sebagai sarana kaji terap teknologi budidaya yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada Tahun 2023, setelah dilakukan penetapan Renstra dan diikuti penetapan IKU dengan Surat Keputusan Bupati Dompu, berikut ini tabel yang menunjukkan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang tertuang dalam RENSTRA 2021-2026 adalah :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-					Akhir RPJMD 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatkan Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah roduksi perikanan tangkap	Ton	45.893,60	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
			Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	9.230	9.925	10.575	11.215	11.860	12.505
			Jumlah Produksi produk olahan kelautan dan perikanan	Ton	22.906,47	23.200	23.400	23.600	23.800	24.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Nilai SAKIP A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Point	71,25	73.34	80,72	84,76	89,84	92,54

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integrasi keahlian sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun lingkungan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal adalah merupakan langkah yang sangat penting dalam menentukan analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan atau kendala yang ada). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar perwujudan Visi dan Misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1.1 Visi dan Misi

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu 2021-2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Dompu yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri,
Sejahtera, Unggul dan Religius (MASHUR)”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 5 (Lima) misi Kabupaten Dompu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih);

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkarakter berbasis kearifan lokal.

Secara umum tugas Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1 dan 2 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 yaitu :

Misi ke-1 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”

Misi ke-2 "Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal berkelanjutan”

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di sektor Kelautan dan Perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Dompu yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-1 dan 2 pembangunan jangka menengah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan

Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menetapkan tujuan yang akan dicapai di tahun 2023, yaitu :

a. Tujuan :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**
- 2. Meningkatnya Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan**

b. Sasaran :

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**
- 2. Meningkatnya Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan**

c. Strategi dan Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya sektor PDPB Sektor Perikanan dan Kelautan	Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan	(Angka Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun N-1)	BPS	Dinas Kelautan dan Perikanan
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab

1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan Budidaya	(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun N)	Statistik Bidang perikanan Bididaya	Bidang Perikanan Budidaya
		Produksi Produk olahan Kelautan dan Perikanan	(Jumlah Produksi Produk Olahan KP Tahun N)	Statistik Bidang PDSPKP	Bidang PDSPKP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Peringkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N – 1 Hasil Penilaian Inspektorat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretariat

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 beserta perubahannya. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nilai
1	Meningkatkan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	47.000 Ton
		Produksi Perikanan Budidaya	10.575 Ton
		Jumlah Produksi Olahan Kelautan Dan Perikanan	23.400 Ton
2	Terwujudnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	80,72 Point

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program berikut :

Tabel 4. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023

No	Uraian Program	Pagu Anggaran (Rp)
A	PROGRAM UTAMA	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.445.339.950,-
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.529.109.850,-
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	3.531.150.350,-
B	PROGRAM PENUNJANG	
	Program Penunjang Urusan Pemerinah	4.014.324.656,-
Jumlah		13.162.320.206,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana diwajibkan setiap Isntansi Pemerintah sebagai unsur Peyelenggaraan Pemerintah Negara untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada yang didasarkan pada perencanaan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam Laporam Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompus Tahun 2023 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 .. 100	Sangat Baik	Hujau Tua
2	76 .. 90	Tinggi	Hujau Muda
3	66 .. 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 .. 65	Rendah	Kuning Muda
5	.. 50	Sangat Rendah	Merah

Akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu merupakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilaksanakan dan sejauh mana dapat dicapai sesuai visi dan misi atau masih belum sesuai visi dan misi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan perencanaan yang akan datang.

LAKIP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban Pimpinan Satuan Kinerja Perangkat Daerah dapat dibuat dengan penetapan indikator kinerja, capaian dan evaluasi kinerja, menganalisa hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi yang akan diambil sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2023 dinyatakan "**berhasil**", yaitu dengan angka capaian **100,93** % dari target yang telah ditetapkan sedangkan realisasi keuangan **98,35** %.

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, berdasarkan rencana tahunan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2023 atas sasaran Strategis Organisasi Tahun 2023 dapat dilakukan sebagai berikut :

3.1.1 Capaian Kinerja Utama

Ada beberapa langkah dalam menyusun dan menetapkan indikator Kinerja berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai Tujuan/Sasaran dan Kebijakan/Program/ Kegiatan.
2. Mengidentifikasi data/informasi yang akan dijadikan indikator kinerja.
3. Menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yakni : Indikator Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*) dan Dampak (*Impact*).

Tujuan Dinas sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026 adalah Meningkatnya Sektor Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Tujuan Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan. Nilai PDRB yang di hitung BPS adalah nilai gabungan dari PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, angka PDRB di tiga sektor tersebut tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.085.543.000,-.

Tabel 6. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dompu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Dompu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.841.535,00	2.932.252,00	3.085.543,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Dompu

Menurut ketentuan yang berlaku Perhitungan Nilai PDRB sektor Kelautan dan perikanan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, perhitungannya digabung dengan sektor Pertanian dan Kehutanan. Tahun 2022 sebesar Rp. 3.085.543.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 153.291.000,- atau 4,97 %, angka PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp. 2.932.252.000,-.

Tabel 7. Angka Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022

No	Uraian	Tahun (Persen)		
		2020	2021	2022
1.	Angka Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	- 0,47	+ 2.05	2,20

Sumber : BPS Dompu

Angka pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan tahun 2022 adalah + 2,20 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sebesar + 2,05 %.

Adapun Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan Tangkap
2. Produksi Perikanan Budidaya
3. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan
4. Nilai SAKIP OPD

3.1.2 Capaian Dan Analisis Kinerja

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan pada Bab II Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Tahun 2023 maka tingkat pencapaian keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, untuk indikator kinerja per indikator secara terperinci dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023.

Dari sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang berasal dari 2 (dua) sasaran, sebanyak 4 (empat) indikator sasaran dinyatakan "**berhasil**". Dari 4 (empat) indikator sasaran, 3 (tiga) diantaranya di atas 100% dan 1 (satu) indikator sasaran lainnya mencapai 93,71%. Indikator yang tidak mampu mencapai target kinerja ini disebabkan menurunnya produksi budidaya rumput laut. Penurunan produksi rumput laut

dikarena adanya serangan penyakit ais-ais dan lumut pada budidaya rumput laut serta mahalnya bibit rumput laut sehingga pembudidaya mengurangi luas lahan budidaya.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sebagai berikut :

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Analisis Pencapaian Akuntabilitas Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022		Ket.
1.	Meningkatnya sektor PDPB Sektor Perikanan dan Kelautan	Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	+ 2,20		BPS
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (Ton, Point)	Realisasi Tahun 2023 (Ton, Point)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (Ton, Pooint)	Kriteria
1	Meningkatnya produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	47.000	47.296,38	100,63	Sangat Baik
		Jumlah Produksi Budidaya	10.575	9.909,83	93,71	Sangat Baik
		Jumlah Produksi produk olahan kelautan dan Perikanan	23.600	23.634	101,00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	80,72	87,51	108,41	Sangat Baik
Rata-rata capaian kinerja					100,93	

Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase Kinerja sebesar **100,93%**.

Pada tabel tersebut hasil pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen kinerja maka hasil capaian kinerja sebagai berikut :

1. 3 (Tiga) indikator kinerja dengan capaian melebihi target (>100%), meliputi :
 - ❖ Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 100,63 %
 - ❖ Jumlah produksi produk olahan Kelautan Perikanan sebesar 101,00
 - ❖ Jumlah produksi Budidaya sebesar 93,71 %
 - ❖ Nilai SAKIP OPD sebesar 108,41 %
2. 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian <100% meliputi :
 - ❖ Produksi Budidaya sebesar 93,71%

3.1.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2023 dibagi dengan rencana target kinerja tahun 2023 dikalikan dengan 100%. Kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian misi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis untuk setiap pernyataan kinerja strategis (capaian), Jumlah realisasi dibagi dengan Jumlah target dikali dengan 100%.

Hasil pengukuran sasaran atas indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan

Pencapaian pada sasaran strategis terdapat tiga indikator sasaran, yakni :

A. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Hasil evaluasi capaian indikator sasaran produksi perikanan tangkap mencapai 100,63%, artinya capaian indikator ini melebihi dari target kinerja ataupun target kinerja terpenuhi. Metode pengukuran indikator ini adalah menghitung jumlah hasil tangkapan nelayan pada tahun atau periode ini. Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (%)	Tahun 2023 (Ton)			Target Tahun 2026 (Ton) (Akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Produksi Perikanan Tangkap	100,39	47.000	47,296,38	100,63	50.000

Untuk Memenuhi Target Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan rekapitulasi anggaran pada tahun 2023 untuk indikator sasaran persentase produksi perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.529.109.850,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 telah berhasil melampaui target tahun 2023, target Produksi Perikanan Tangkap pada RPJMD sebesar 47.000 ton terealisasi 47.296,38 Ton dengan capaian kinerja tahun 2023 mencapai 100,63 %.

Secara umum Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 meningkat jika dibanding tahun 2022. Produksi hasil tangkapan tahun 2023 sebanyak 47.296,38 Ton sedangkan tahun 2022

sebanyak 46.107,07 Ton. Peningkatan hasil peroduksi perikanan antara lain dipengaruhi oleh penambahan sarana dan prasarana dari dana DAK dan DAU Tahun 2023.

(Rincian Jumlah Produksi Per Jenis Ikan Perikanan Tangkap Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.)

Tabel 10. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2023

Jenis Tangkapan	Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)
Ikan	6.925,18	14.155,51	16.400,54
Binatang Berkulit Keras	71,76	244,76	171,76
Binatang Berkulit Lunak	17,39	61,72	138,69
Rumput Laut	38.871,27	31.705,70	30.585,38
Total	45.893,60	46.167,07	47.296,38

Realisasi sampai dengan tahun 2023 untuk produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 ini sebesar 47.296,38 ton kondisi ini diharapkan akan terus meningkat sehingga bisa mencapai target RPJM sebesar 50.000 ton di tahun 2026.

Seperti terbaca pada tabel 8 diatas, jumlah produksi jenis tangkapan ikan tahun 2022 sebesar 14.155,51 ton, tahun 2023 meningkat menjadi 16.400,54 ton atau 115,86% bertambah sebesar 2.245,03 Ton atau 13,69%, penambahan produksi juga terlihat pada binatang berkulit lunak, tahun 2022 sebesar 61,72 ton, tahun 2023 sebanyak 138,69 ton atau 224,71 % meningkat sebesar 76,97 ton atau 55,50%, komoditi ikan berkulit keras mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2022 sebesar 244,76 ton, produksi tahun 2023 sebesar 48,30 ton atau berkurang (406,75)%, komoditi rumput laut tangkapan (*sargasum*) mengalami penurunan bila dibandingkan produksi tahun 2022

sebesar 31.705,70 ton menjadi 30.585,38 ton tahun 2023 berkurang sebesar ton atau (3,66)%.

Penambahan produksi dari jenis tangkapan ikan, binatang berkulit lunak dan rumput laut, sedang yang mengalami penurunan adalah produksi komoditi binatang berkulit keras dan rumput laut (*sargasum*), penurunan produksi komoditi binatang berkulit keras disebabkan antara lain, masih terbatasnya permintaan dari luar untuk jenis Rajungan dan kepiting, sedangkan rumput laut (*sargasum*) disebabkan faktor berkurangnya ketersediaanya di alam akibat pengambilan yang terus menerus.

Bertambahnya produksi jenis ikan tangkapan disebabkan antara lain adanya bantuan sarana prasarana, alat tangkap, alat bantu perikanan, dan sebagian nelayan yang sebelumnya beralih mengambil rumput laut (*sargasum*) kembali menangkap ikan, akibat terbuka kembali akses pengiriman ikan keluar daerah.

Berbagai upaya yang tetap dilakukan dalam rangka meningkatnya produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Penggunaan GPS dan Fish Finder guna membantu serta memudahkan nelayan mengetahui posisi dan gerombolan ikan,
2. Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan
3. Peningkatan jumlah armada/kapal penangkapan ikan
4. Sosialisasi dan pembinaan yang intensif kepada nelayan

Selain dari upaya-upaya di atas, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan demi mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 seperti upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memadai antara lain adalah kegiatan program rehabilitasi luas lahan mangrove.

A.1.Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Target Sarana dan prasarana Perikanan Tangkap pada tahun 2023 sebanyak 76 Unit, Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan mampu melaksanakan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai target yaitu sebanyak 76 unit, Target Tahun 2022 sampai 2026 adalah target dari Renstra 2021 - 2026 Capaian Tahun 2021 sebesar 2.843 unit, capaian tersebut adalah akumulasi dari dari capaian sarana prasarana pada RPJMD tahun 2021 – 2026.

Tabel 11. Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2023

Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Unit)			
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.777	2.843	1.400	1.476

Penambahan ini bersumber dari pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang dananya bersumber dari dana DAK dan DAU Tahun 2023. Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap perlu diupayakan penambahannya mengingat umur ekonomis sebagian sebagai besar alat tangkap relatif tidak tahan lama.

Dengan adanya penambahan API ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para nelayan untuk menangkap ikan sehingga secara paralel dapat mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap khusus jenis ikan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.

A.2. Luas Lahan Rehabilitasi Mangrove

Target Rehabilitasi lahan mangrove selama periode RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 seluas 10 (sepuluh) ha.

Untuk tahun 2023 dengan target rehabilitasi mangrove seluas 1 (satu) ha dengan realisasi capaian 8 (delapan) Ha.

Tabel 12. Luas Lahan Rehabilitas Mangrove (Ha) Tahun 2021-2023

Realisasi Luas Lahan Rehabilitasi Mangrove (Ha)		
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2	5	1

Anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi mangrove setiap tahunnya relatif minim pada tahun 2023 dengan anggaran yang dapat dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 1.000 pohon bersumber dari APBD Kabupaten Dompu sedangkan capaian luas lahan rehabilitasi mangrove dari dana tersebut seluas 1 (satu) Ha. Capaian 4 (empat) Ha sebagian besar hasilnya bersumber dari kerja sama dengan berbagai pihak sebagai pendorong dari keberhasilan sehingga capaian melebihi target pada tahun 2023 antara lain :

1. Adanya Alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2023 berlokasi di Desa Soro seluas 1 Ha, dengan bibit 1.000 pohon sistim penanaman yang dipakai Sistim Rumpon.
2. Kegiatan penanaman mangrove Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Mahasiswa KKN Unram, Camat Manggelewa, Aparat Desa Kwangko, SMK Kelautan Manggelewa dan Pokmaswas seluas seluas 50 are (500 pohon).
3. Kegiatan Penanaman mangrove Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan KKN Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram seluas 30 are (300 pohon)
4. Kegiatan Penanaman mangrove Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kodim 1614 Dompu dalam rangka penanaman serentak mangrove menyambut hari

ulang tahun TNI, sebanyak 1.000 pohon, seluas 1 Ha, dibantu Camat, Kapolsek Kempo, SMA 2 Kempo, SMK Kelautan Kempo, Masyarakat Desa Soro, Camat Kecamatan Kempo, Pokmaswas.

Capaian luas dalam rehabilitasi mangrove setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini akan terus diupayakan untuk mendukung kelestarian lingkungan kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi peningkatan hasil perikanan tangkap.

Ditengah upaya pemerintah dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas luas lahan mangrove yang masih dijumpai dan bahkan kerap kali terjadi akibat perilaku masyarakat yang desktruktif untuk merusak lahan mangrove diantaranya :

- a) Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat keberlanjutan kelestarian mangrove
- b) Masih tingginya pembukaan tambak baru yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian ekosistem mangrove
- c) Pengambilan/eksploitasi kayu mangrove untuk kebutuhan rumah tangga maupun bahan bangunan (bagai kayu bakar dan bahan bangunan) yang masih seringkali terjadi.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut dapat mendorong rusaknya ekosistem Kelautan dan Perikanan (KP).

B. Produksi Perikanan Budidaya

Hasil evaluasi tahap capaian kinerja indikator produksi perikanan budidaya tahun 2023 mencapai 93,71% , produksi perikanan budidaya sebesar 9.909,84 ton dari target indikator produksi perikanan budidaya sebesar 10.575 Ton. Capaian realisasi indikator belum mencapai target ini disebabkan

turunnya produksi rumput laut, karena adanya gangguan penyakit Ais-Ais dan lumut, kelangkaan bibit dan harga bibit yang tinggi mengakibatkan berkurangnya luasan tanaman rumput laut, sehingga berimbas turunnya produksi. Adapun hasil pengukuran capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 13. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)			Target Tahun (Akhir Rpjmd) Ton
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Jumlah Produksi budidaya	12.263,10	10.575	9.909,83	93,71	12.505

Berdasarkan rekapitulasi anggaran pada tahun 2023 untuk indikator kinerja persentase produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 3.531.150.350,- dengan hasil capaian produksi Perikanan Budidaya mencapai 93,71% dari target kinerja sebesar 10.575 ton dengan realisasi Produksi Perikanan Budidaya sebesar 9.909,83 ton. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 12.263,10 ton dari target 9.323 Ton menurun 2.353,27 ton atau 23,75 %.

Faktor-faktor yang **penyebab hampir mencapai target** yang ditetapkan :

1. Produksi budidaya air payau yang melampaui target, target tahun 2023 sebesar 6.185 ton realisasi sebesar 7.114,25 ton
2. Bantuan sarana prasarana pembudidaya baik budidaya laut, payau dan Air tawar
3. Pendampingan dan penyuluhan yang terus menerus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dan Penyuluh Perikanan

4. Penerapan CBIB pada kegiatan budidaya.

Produksi Tambak Sederhana sebenarnya dapat lebih tinggi, tetapi sekitar bulan Desember terjadi banjir Rob, menyebabkan jebolnya tanggul tambak di sebagian wilayah budidaya air payau yang ada di Kabupaten Dompu, sebagian petani tambak tidak dapat menyelamatkan jenis ikan budidaya miliknya.

Tabel 14. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023
Berdasarkan Sumber Produksi Perikanan Budidaya

No	Uraian	Jumlah Produksi (Ton)
1	Tambak Tradisional (Sederhana)	7.003,15
2	Tambak Semi Intensif	151,26
3	Rumput Laut	1.702,05
4	Kolam Air Tenang	839,34
5	Kolam Air Deras	214,05
	Jumlah	9.909,84

Produksi usaha budidaya tambak Tradisional (Sederhana) di tahun 2023 bila dibandingkan dengan 2022, Produksi Tahun 2023 sebesar 7.003,15 Ton sedangkan produksi tahun 2022 sebesar 7.722,21 Ton, mengalami penurunan sebesar 719,06 atau 10,26 %.

Faktor yang menyebabkan penurunan Produksi Budidaya Air Payau antara lain :

1. Konstruksi tambak yang kurang standar (manual), ketika banjir/rob udang/bandeng hilang terbawa banjir/rob, pematang banyak yang patah.
2. Kondisi air tambak yang terlalu asam sehingga menyebabkan udang mati masal dan bandeng lambat pertumbuhan/kerdil sehingga masa produksi lebih lama dan jumlah produksi berkurang

3. Faktor lingkungan (penyakit)/virus yang menyerang udang vaname di beberapa lokasi tambak terutama Desa Mbawi
4. Faktor bibit dan air asam saling berkaitan di awal tebat, serta siklus penebaran pelaku usaha kurang menentu seperti biasanya disebabkan oleh cuaca yang berubah sepanjang tahun 2023.

Produksi usaha budidaya rumput laut pada tahun ini mengalami penurunan produksi sebesar 1.744,5 ton atau menurun sebesar 102,49% jika dibandingkan dengan hasil produksi 2022. Produksi tahun 2022 sebesar 1.702,05 ton sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 3.446,55 ton.

Adapun pencapaian produksi perikanan budidaya pada tiga tahun terakhir ini sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Produksi Budidaya (Ton) Tahun 2021-2023

Kegiatan Budidaya	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Budidaya Payau (Ton)	6.175	7.913,84	7.154,41
Budidaya Tawar (Ton)	854,39	902,71	1.053,39
Budidaya Rumput Laut (Ton)	2.190,06	3.446,55	1.702,05
Jumlah	9.219,47	12.263,1	9.909,84

Dari pencapaian tersebut, masih terasa beberapa hambatan yang dijumpai, diantaranya :

1. Masih terbatasnya sarana ekskavator guna merevitalisasi tambak
2. Biaya rehabilitasi tambak yang tinggi.
3. Salinitas air yang cukup tinggi akibat dari musim panas
4. Penerapan CBIB yang masih kurang ditataran petambak tradisional.
5. Masih terkendala untuk mendapatkan bibit ikan air tawar, karena produksi bibit di BBI Matua dan UPR masih terasa

kurang jika dibanding dengan kebutuhan bibit untuk kolam air tawar.

6. Sering terjadi kematian dengan jumlah besar bibit lele pada awal tebar untuk pembudidaya kolam baik kolam terpal maupun tradisional (tanah/semem).
7. Kendala pada biaya produksi khususnya biaya untuk pembelian pakan.

Dari beberapa hambatan tersebut, diupayakan pemecahan dan serta penanggulangannya :

1. Mengusulkan *Excavator* pada pemerintah pusat. *Excavator* yang ada di Dompu masih sangat kurang untuk kebutuhan merehabilitasi tambak masyarakat
2. Mengusulkan adanya alokasi pupuk subsidi khusus kegiatan budidaya perikanan
3. Terus melakukan pembinaan dan pendampingan oleh seluruh stakeholder
4. Memberikan pendampingan yang intens kepada pembudidaya tentang cara budidaya lele dan komoditi lainnya yang baik
5. Mengusahakan untuk penambahan calon induk khususnya di BBI Matua dan UPR yang ada di Dompu supaya dapat meningkatkan produksi bibit yang dibutuhkan
6. Mengusulkan untuk mendapatkan izin pembuatan pakan (pakan mandiri) kepada KKP. Hal itu sangat diperlukan untuk memotong biaya produksi yang cukup tinggi.

Faktor-faktor yang **penyebab kurangnya keberhasilan** dari target yang ditetapkan :

1. Kelangkaan bibit rumput laut diawal masa tanam
2. Harga bibit rumput laut yang melambung tinggi (Rp. 1.200.000,- s/d Rp.1.200.000 per tali)
3. Harga rumput laut cenderung menurun, hampir tidak ada kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2023 bertahan di harga Rp. 13.000,- s/d Rp. 16.000,-.

B.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dirasa sangat mempengaruhi hasil produksi budidaya. Pada tahun 2022 pencapaian sarana dan prasarana budidaya sebesar 1.400 Paket dan pada tahun 2023 mengalami penambahan sebesar 137 Paket. Pencapaian ini dipengaruhi karena adanya kegiatan pengadaan sarana prasarana budidaya yang di lakukan oleh pemerintah, baik melalui Program/Kegiatan pengadaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum di thun 2023.

Tabel 16. Jumlah Pencapaian Sarana dan Prasarana Tahun 2021-2023

Sarana Perikanan Budidaya 2020 - 2022 (Unit)		
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.516	1.400	137

C. Jumlah Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator produksi produk olahan Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar 23.634 ton dari target Produksi olahan 23.600 ton dan capaian kinerja sebesar 101,00%.

Tabel 17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD) (Ton)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase produksi produk olahan KP	22.792	23.600	23.634	101,00	24.000

Berdasarkan rekapitulasi anggaran pada tahun 2023 untuk indikator sasaran produksi produk olahan KP sebesar Rp. 3.087.735.350,- (Dua milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dilihat dari tabel 17 bahwa dibandingkan pencapaian di Tahun 2022 sebesar 22.875,70 ton dari target sebanyak 23.200 ton. menunjukkan adanya peningkatan di Tahun 2023 yakni dengan realisasi 23.634 ton dari terget 23.600 ton dengan persentase capaian 101,00%. Mengingat tingginya produksi perikanan tangkap dan budidaya di daerah, perlu diupayakan terus semangat, kreativitas dan konsistensi pengolah dalam melakukan usahanya sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran dengan kualitas produk yang terjamin. Pencapaian ini telah mampu memenuhi target RPJMD di 2023. (Jumlah produksi olahan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada lampiran 3).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan produk Kelautan dan Perikanan, antara lain :

1. Intensitas pembinaan dan pendampingan pada kelompok pengolah dan pemasar, sehingga masyarakat yang berada di wilayah pesisir banyak yang berprofesi sebagai pemasar langsung ke konsumen, dengan menggunakan roda dua, roda tiga dan roda empat.
2. Produksi Perikanan Budidaya secara keseluruhan mengalami peningkatan sehingga produk olahan kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan.
3. Tahun 2023 Kabupaten Dompu menerima Bantuan dari KKP berupa Chest freezzer 2 unit untuk 2 kelompok, Cool box 26 unit untuk 2 kelompok, sarana pengolahan untuk 1 kelompok.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengolah dan pemasar, antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan es batu, sebagai sarana utama pengawetan ikan
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung pemasar dalam memasarkan hasil olahan terutama sarana kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan sarana rantai dingin
3. Perubahan cuaca yang tak menentu berdampak pada kualitas dan kuantitas produk olahan serta produk pemasaran
4. Masih relatif rendah minat untuk keberlangsungan usaha pelaku pengolah dan pemasar
5. Kemandirian usaha yang masih rendah, masih bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Keberhasilan pencapaian ini dengan sendirinya meningkatkan pendapatan bagi keluarga pengolah dan pemasaran sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan sehingga meningkatkan hasil konsumsi ikan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan produksi produk olahan Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah meningkatkan jumlah pengolah dan pemasar produk Kelautan dan Perikanan Rumah Tangga Produksi (RTP).

C.1 Jumlah Rumah Tangga Produksi (RTP) Pengolah dan Pemasar

Jumlah realisasi RTP Tahun 2023 sebanyak 1.260 orang, mengalami peningkatan sebanyak 109 orang (8,65%) dibandingkan dengan jumlah RTP tahun 2022 yang berjumlah 1.151 orang. Jumlah RTP tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 18. Jumlah RTP Pemasar dan Pengolah (orang) Tahun 2021-2023

RTP pengolah dan Pemasar (Orang)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	1.136	1.151	1.260

Faktor faktor yang mendukung pencapaian target Jumlah RTP Pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan antara lain :

1. Bantuan sarana sarasarana baik dari dana DAK, DAU maupun Sarana prasarana bantuan KKP
2. Pendampingan dan penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompu dan Penyuluh
3. Adanya pelatihan pengolahan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelatihan Pengolahan dari KKP lewat daring/luring.

Faktor-faktor yang dirasa masih menjadi kendala peningkatan jumlah RTP pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pemasar.
2. Menu Dana DAK Tahun 2023 masih terbatas untuk Rehabilitasi *Cold Storage*, rehabalitasi 1 (satu) unit UPI dan rehabilitasi Pabrik Es sedangkan menu untuk bantuan pemasar dan pengolah belum tersedia.
3. Untuk memenuhi kebutuhan RTP POKLAHSAR, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu berkoordinasi dan mengusulkan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat (KKP).
4. Kurangnya minat dan kemampuan pelaku usaha dalam mengolah dan memasarkan produk olahan kelutan dan perikanan.

Upaya pemecahan :

- 1) Mengusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan KKP untuk pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasar.
- 2) Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pengolah dan pemasar untuk tetap berusaha mempertahankan keberadaan rantai dingin guna menjaga kualitas produk kelautan dan perikanan.
- 3) Memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengolah dan pemasar agar meningkatkan minat dalam menjaga keberlanjutan usahanya.

Manfaat yang dirasakan, peningkatan pendapatan pengolah dan pemasar, terpenuhinya gizi (protein dari ikan) masyarakat pelosok yang jauh dari pesisir, mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

C.2. Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Pencapaian pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator sasaran, yakni :

A. Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat.

Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat baru kita dapatkan angka perkiraan untuk tahun 2023, Angka konsumsi ikan yang valid baru dirilis setelah keluar angka SUSENAS dari Badan Statistik Nasional sampai awal Januari Tahun 2024 Badan Statistik Nasional belum merilis Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023. Angka perkiraan Konsumsi Ikan tahun 2023 sebesar 48,70 Kg/KK/Tahun

Tabel 19. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2022 (Kg/Kap/Thn)			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
			Target	Realisasi (perkiraan)	Capaian Kinerja	
1	Persentase Konsumsi ikan masyarakat (kg/kap/tahun)	104,44 %	47	48,70	103,61%	50 kg/kap/tahun

Pada tabel 19 menggambarkan nilai perkiraan angka konsumsi ikan masyarakat tahun 2023 mencapai 48,70 Kg/KK/tahun atau dengan pencapaian 103,61% dari target tahun 2022 sebesar 45 Kg/kk/Thn dengan realiasi 48,70 kg/kk/tahun berdasarkan surat Kepala Dnas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu nomor : 523/367/DKP/2023 Tanggal : 20 Juni 2023 Perihal : Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2022 Kabupaten Dompu, Hal ini disebabkan karena didukung pola makan masyarakat di Dompu yang makan harus dengan ikan. Pemerintah Kabupaten Dompu tetap menggalakkan Gemar Makan Ikan mendukung Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Dompu.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi ikan masyarakat, antara lain:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan
2. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya protein dari ikan.
3. Terbentuknya Forum peningkatan konsumsi ikan Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Desa.
4. Pembinaan dan Pendampingan yang berkelanjutan pada pelaku usaha perikanan.

5. Upaya Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melaksanakan Gerakan Makan Ikan mendukung penurunan Angka Stunting.

Dalam upaya pencapai, masih terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi, antara lain :

1. Masih terdapat daerah-daerah tertentu yang sulit untuk mendapatkan ikan terutama ikan segar.
2. Cuaca yang ekstrim yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk olahan dan produk pemasaran.

3.1.4 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.91.700.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tima Ratus Ribu Rupiah) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Tahun Anggaran 2022 belum dapat memenuhi target atau 73,73 %.

2. Belanja

Pada Tahun 2022 anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DAU untuk **Belanja Operasi** dan **Belanja Modal**. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah anggarannya sebesar : Rp. 8.339.190.835,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) realisasi sebesar Rp.

8.009.497.672,- (Delapan Milyar Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Dua Rupiah) atau 96,05%. Belanja Modal sebesar Rp. 307.950.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp. 307.900.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau 99,98%.

Tabel 20. Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	(%)
1	Penerimaan PAD	260.000.000,-	191.700.000,-	73,73
2	Belanja Pegawai	3.047.933.641,-	2.254.442.111,-	96,93
3	Belanja Barang dan Jasa	7.340.966.748,-	7.237.639.238,-	98,59
4.	Belanja Hibah	30.000.000,-	30.000.000,-	100,00
5.	Belanja Modal	2.743.419.817,-	2.722.194.841,-	99,23
	Jumlah 2 s/d 5	13.162.320.206	12.944.276.190	95,64

Rencana Srategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 telah memuat Program Kegiatan Dinas Untuk mendukung tercapainya IKU yang telah ditetapkan, Program Kegiatan tersebut sebagai berikut ;

1. **Program** : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,**

Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

1. Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Seluruh nama program dan kegiatan pada DPA 2023 berbeda dengan Program Kegiatan pada Renstra Tahun 2021 - 2026, dikarenakan adanya penyusauain dari KemenPAN dengan penerapan Aplikasi SIPD.

Adanya perubahan nama program dan kegiatan yang ada pada RENSTRA 2021 - 2026 dengan DPA 2021 yang terkoneksi dengan aplikasi SIPD tidak mempengaruhi pencapaian IKU Dinas, dikarenakan pada prinsipnya nama program dan kegiatan yang ada pada RENSTRA 2021 - 2026 selaras dengan nama program dan kegiatan di DPA 2023.

Untuk mengetahui pencapaian target anggaran yang telah direncanakan dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan. Tabel berikut ini menggambarkan tentang realisasi keuangan dari program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Tabel 21. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
I.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	13.162.320.206	12.944.771.190	217.549.016	98,35
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Kabupaten/Kota	4.014.324.656	3.915.469.874	98.854.782	97,54
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.714.550	244.266.000	448.550	99,82
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	244.714.550	244.266.000	448.550	99,82

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.933.641	3.034.857.111	13.076.530	99,57
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.113.641	2.954.937.111	12.176.530	99,59
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	80.820.000	79.920.000	900.000	98,89
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.057.677	232.949.277	4.108.400	98,27
1.3.1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	50.797.577	49.133.500	1.664.077	96,72
1.3.2	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.662.000	33.661.000	1.000	100,00
1.3.3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	24.947.000	24.663.000	284.000	98,86
1.3.4	Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan	16.291.100	16.290.000	1.100	99,99
1.3.5	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	6.960.000	5.050.000	1.910.000	72,56
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.400.000	104.151.777	248.223	99,76
1.4	Pengadaan Milik Daerah Penunjang	61.726.000	61.726.000	-	100,00
1.4.1	Pengadaan Mebel	34.776.000	34.776.000	-	100,00
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.950.000	26.950.000	-	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	295.101.888	294.532.205	569.683	99,81
1.5.1	Penyedia Jasa Komunikasi,	56.684.060	56.679.293	4.767	99,99

	Sumberdaya Air dan Listrik				
1.5.2	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.417.828	237.852.912	564.916	99,76
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	127.790.900	127.059.281	731.619	99,43
1.6.1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	67.390.900	66.799.281	591.619	99,12
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	-	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.400.000	56.260.000	140.000	99,75
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.529.109.850	2.519.347.456	9.762.394	99,61
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota	2.424.580.000	2.414.941.610	9.638.390	99,60
2.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	2.424.580.000	2.414.941.610	9.638.390	99,60
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.529.850	104.405.846	124.004	99,88
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Jumlah	104.529.850	104.405.846	124.004	99,88

	Nelayan yang Meningkatkan)				
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.531.150.350	3.485.492.556	45.657.794	98,71
3.1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	496.999.000	458.902.225	38.096.775	92,33
3.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	496.999.000	458.902.225	38.096.775	92,33
3.2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.034.151.350	3.026.590.331	7.561.019	99,75
3.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.787.390.000	2.780.152.531	7.237.469	99,74
3.2.2	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	246.761.350	246.437.800	323.550	99,87
4.	Program Pengolahan dan Pemasar Hasil	3.087.735.350	3.024.461.304	63.274.046	97,95
4.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	330.329.000	330.184.950	144.050	99,96
4.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	330.329.000	330.184.950	144.050	99,96

4.2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	2.757.406.350	2.694.276.354	63.129.996	97,71
4.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	11.573.000	11.573.000	-	100,00
4.2.2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	2.745.833.350	2.682.703.354	63.129.996	97,70

3.1.5 Efektifitas Penggunaan Dana

Pada tahun anggaran 2023 capaian realisasi anggaran sebesar 98,35% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 100,93% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana (rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam lampiran). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. 2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif. 3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif. 4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif. 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tabel 22. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (Ton, Point)	Ralisasi (Ton, Point)	Capaian Kinerja (Ton, Point)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya Produksi kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	47.000	47.296,38	100,63	2.529.109.850,-	2.519.347.456,-	99,61
	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	10.575	9.909,83	93,71	3.531.150.350,-	3.485.492.556,-	98,71
	Persentase Produksi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	23.200	22.875,70	98,24	3.087.735.350,-	3.024.461.304,-	97,95
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	80,72	87,51	108,41	4.014.324.656,- -	3.915.469.874,- -	97,54 -
Total				100,93	13.162.320.206,-	12.944.771.190,-	98,35

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*). Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atau LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2023 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023, dengan capaian 3 (tiga) indikator melebihi 100% dari target dan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 93,71%.

Dari sisi akuntabilitas anggaran, bahwa pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja sebanding dengan capaian sasaran kerjanya. Hal ini terlihat dari realisasi penyerapan anggaran yang mencapai 98,35% yaitu sebesar Rp 12.944.771.190,- dari target anggaran sebesar Rp, 13.162.320.206,-.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tetap berupaya untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Tersedianya kualitas/kuantitas SDM aparat yang memadai.
2. Mengupayakan adanya bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pembudidaya, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan
3. Mengoptimalkan pendampingan, penyuluhan, serta kaji terap teknologi
4. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang operasional kegiatan.
5. Terlaksananya pelayanan publik bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil.
6. Menerapkan inovasi untuk kemajuan usaha kelautan
7. Terus melakukan pembinaan terhadap nelayan untuk senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya laut dengan tidak menggunakan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan sehubungan dengan akuntabilitas kinerja dinas kelautan dan perikanan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Semua kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam DPA tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tingkat realisasi fisik 100% serta realisasi keuangan sebesar 98,35 %
2. Pencairan tahap awal proyek sudah disesuaikan dengan ketentuan, kegiatan pada proyek sudah dapat diselesaikan pada Triwulan III di Tahun 2023

3. Tetap mengupayakan pendampingan dan penyuluhan kepada pembudidaya untuk menerapkan pola CBIB pada budidaya perikanan
4. Terus mengupayakan sosialisasi pada nelayan untuk menggunakan alat/bahan ramah lingkungan dalam proses penangkapan
5. Semua barang yang diperuntukan kepada masyarakat telah disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan SK Bupati Dompu
6. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu pada Tahun 2023 akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Dompu, Februari 2024
Kepala-Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dompu,



AMIRUDDIN, S.HUT
NIP. 19711130 199803 1 009

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023
5. Cascadding Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
6. Rincian Anggaran Per Program dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
7. Rincian Jumlah Produksi Per Jenis Ikan Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan 2023
8. Data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan 2023
9. Data Jumlah Produksi Olahan Perikanan dan Kelautan 2022 dan 2023

Rincian Anggaran Per Program Berdasarkan DPA dan Laporan
Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
I.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	13.162.320.206	12.944.771.190	217.549.016	98,35
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Kabupaten/Kota	4.014.324.656	3.915.469.874	98.854.782	97,54
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.714.550	244.266.000	448.550	99,82
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	244.714.550	244.266.000	448.550	99,82
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.933.641	3.034.857.111	13.076.530	99,57
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.113.641	2.954.937.111	12.176.530	99,59
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	80.820.000	79.920.000	900.000	98,89
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.057.677	232.949.277	4.108.400	98,27
1.3.1	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	50.797.577	49.133.500	1.664.077	96,72
1.3.2	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.662.000	33.661.000	1.000	100,00
1.3.3	Penyedia Bahan Logistik Kantor	24.947.000	24.663.000	284.000	98,86
1.3.4	Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan	16.291.100	16.290.000	1.100	99,99
1.3.5	Penyedia Bahan Bacaan dan	6.960.000	5.050.000	1.910.000	72,56

	Peraturan Perundang-Undang				
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.400.000	104.151.777	248.223	99,76
1.4	Pengadaan Milik Daerah Penunjang	61.726.000	61.726.000	-	100,00
1.4.1	Pengadaan Mebel	34.776.000	34.776.000	-	100,00
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.950.000	26.950.000	-	100,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	295.101.888	294.532.205	569.683	99,81
1.5.1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	56.684.060	56.679.293	4.767	99,99
1.5.2	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.417.828	237.852.912	564.916	99,76
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	127.790.900	127.059.281	731.619	99,43
1.6.1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	67.390.900	66.799.281	591.619	99,12
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	-	100,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.400.000	56.260.000	140.000	99,75
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.529.109.850	2.519.347.456	9.762.394	99,61
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang	2.424.580.000	2.414.941.610	9.638.390	99,60

	Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota				
2.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	2.424.580.000	2.414.941.610	9.638.390	99,60
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.529.850	104.405.846	124.004	99,88
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Jumlah Nelayan yang Meningkatkan)	104.529.850	104.405.846	124.004	99,88
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.531.150.350	3.485.492.556	45.657.794	98,71
3.1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	496.999.000	458.902.225	38.096.775	92,33
3.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	496.999.000	458.902.225	38.096.775	92,33
3.2	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.034.151.350	3.026.590.331	7.561.019	99,75
3.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.787.390.000	2.780.152.531	7.237.469	99,74
3.2.2	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	246.761.350	246.437.800	323.550	99,87
4.	Program Pengolahan dan Pemasar Hasil	3.087.735.350	3.024.461.304	63.274.046	97,95
4.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan	330.329.000	330.184.950	144.050	99,96

	dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
4.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	330.329.000	330.184.950	144.050	99,96
4.2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah	2.757.406.350	2.694.276.354	63.129.996	97,71
4.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	11.573.000	11.573.000	-	100,00
4.2.2	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha pPerikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	2.745.833.350	2.682.703.354	63.129.996	97,70